



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Juni 2016

Halaman: 1

Walikota Buka Puasa Bersama 69 Tahun Pemkot Yogyakarta

Jogja Masih Kurang PNS, Tidak Mungkin Dikurangi



POTONG TUMPENG -- Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti potong tumpeng menandai usia 69 tahun Pemkot Yogyakarta, di Balaikota Yogyakarta, Selasa (7/6). Acara tasyakuran tersebut sekaligus buka puasa bersama dengan karyawan setempat.

PEMERINTAH -- Kota (Pemkot) Yogyakarta Selasa (7/6) kemarin, genap berusia 69 tahun. Di usianya yang sudah matang itu Pemkot Yogyakarta terus berusaha untuk memperbaiki diri, termasuk dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga saat ini, Pemkot Yogyakarta masih mengalami kekurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga adanya permasalahan rasionalisasi PNS sebanyak 1 juta pegawai yang dilontarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) tidak akan berlaku di kota Yogyakarta.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan kota Yogyakarta masih mengalami kekurangan 4.469 pegawai. Maka pengurangan PNS tidak berlaku di kota Yogyakarta. "Saya katakan, untuk pengurangan PNS tidak berlaku di kota Jogja," kata Haryadi disambut tepuk tangan ratusan pegawai saat Tasyakuran HUT ke-69 Pemkot Yogyakarta dan buka puasa bersama di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (7/6).

"Boro-boro dikurangi, saya ini kurang 4.469 pegawai. Karena analisisnya jabatan. Bukan saya melawan beliau, melawan Presiden, tapi Pak menteri yang Menteri PAN RB. Jadi saya katakan bahwa yang dibutuhkan adalah pemenuhan kualitas pegawai," katanya.

Haryadi mengatakan, Pemkot Yogyakarta berdiri dua tahun setelah kemerdekaan RI. Pemkot dilahirkan terus berubah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Para pegawai yang saat ini masih bekerja di lingkungan Pemkot diminta untuk tidak melupakan para pegawai yang kini sudah pensiun dan juga misionar-misionar Wali Kota Yogyakarta yang telah berjasa.

Pada usianya yang ke-69 tahun ini, Pemkot Yogyakarta berupaya untuk lebih mengerti masyarakat dan lebih memahami masyarakat. Karena dengan memahami masyarakat tentu bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat. "Kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Secara alami

Rencana pengurangan PNS ini ternyata tidak disetujui oleh Presiden Jokowi. Dalam penjelasan di Jakarta, Selasa kemarin, Jokowi menegaskan rasionalisasi PNS yang sudah ramai "perbincangan masyarakat ini hanya akan dilakukan pemerintah secara alami.

Sekarang Pranonono memang sudah membantah ada rencana pemerintah akan memangkas 1 juta PNS menyusul pernyataan MenPAN RB Yuddy Chrisnandi soal rasionalisasi atau pengurangan PNS untuk efisiensi anggaran. Presiden Joko Widodo mengatakan rasionalisasi itu diterapkan secara alami.

"Kita ingin belanja pegawai kita bisa lebih efisien. Oleh sebab itu, kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, misal 1 tahun pensiun 120.000, pada tahun ke-5, kita hanya menerima 60.000. Artinya berkurang banyak sekali," ucap Presiden Jokowi usai menghadiri pengarah di Kantor Kemendagri, Jl Senen Raya, Jakarta, Selasa (7/6).

Jokowi tak mengatakan bahwa rasionalisasi itu dilakukan dengan merumuskan PNS, melainkan proses efisiensi secara alami dengan mengurangi penerimaan PNS. "Ya itu kalau dilakukan seperti itu, suatu saat tercapai sehingga betul-betul isi kualitas, kemudian belanja lebih efisien bisa dilakukan," lanjut Jokowi.

Dengan demikian, efisiensi anggaran itu dilakukan dalam jangka waktu panjang. Jika pemerintah membatasi penerimaan PNS, dengan sendirinya jumlahnya berkurang. Namun Jokowi sedikit menyeringai rencana MenPAN RB ini yang tak lebih dulu dilaporkan kepadanya. "Menang itu rencana dan konsep dari MenPAN memang belum saya terima," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Sekretaris Pranonono Anung juga menyatakan sebenarnya MenPAN RB akan melaporkan lebih dulu kepada Presiden jika ada rencana ingin memangkas Rp 1 juta PNS. Sekalipun angka Rp 1 juta itu masih simulasi. "Kalau memang ada hal yang penting, ada hal yang urgent, seogyaanya dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden atau dirataskan (rapat terbatas). Baru kemudian Presiden mengambil sikap terhadap hal tersebut," tutur Pranonono.

"Tetapi kemarin saya pribadi sudah sampaikan langsung kepada MenPAN RB, dan MenPAN RB menyampaikan tidak benar seperti yang berkembang di publik," tegasnya. (dic/)

Tid
Kepala
Tid
rihastono, S.S
969723 1996

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005